

INTERVIEW GUIDE APBD PRO RAKYAT

Walikota Blitar Dan Pemerintah Daerah

1. Apa yang dimaksud dengan APBD pro Rakyat? Apa Dasar hukum Blitar Melaksanakan APBD prorakyat?
2. Apa tujuan dari APBD prorakyat?
3. Sejak kapan APBD Pro Rakyat diterapkan di KotaBlitar?
4. Bagaimana gambaran umum pendapatan daerah dalam APBD Pro Rakyat KotaBlitar?
5. Bagaimana gambaran umum belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat KotaBlitar?
6. Bagaimana pola realisasi belanja daerah dalam APBD pro Rakyat KotaBlitar?
7. Bagaimana alur dalam penyusunan APBD Pro Rakyat KotaBlitar?
8. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD Pro Rakyat KotaBlitar?
9. Bagaimana gambaran umum pendapatan daerah dalam APBD Pro Rakyatdalam bidang pendidikan KotaBlitar?
10. Bagaimana gambaran umum belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan KotaBlitar?
11. Bagaimana pola realisasi belanja daerah dalam APBD pro Rakyat dalam bidang pendidikan KotaBlitar?
12. Bagaimana alur dalam penyusunan APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikanKota Blitar?
13. Siapasajayangterlibatdalam penyusunanAPBDPro Rakyat dalambidangpendidikan KotaBlitar?
14. Bagaimana langkah pemerintah pusat untuk mempercepat penyerapan belanjadaerah dalam bidang pendidikan Kota Blitar?
15. Apa kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan belanja daerah dalambidang pendidikan KotaBlitar
16. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah KotaBlitar?
17. Apa dasar hukum dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar?
18. Bagaimana prosedur pengawasannya KotaBlitar?
19. Siapa saja yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah KotaBlitar?
20. Bagaimana tindakan DPRD jika ada temuan dalam pengawasan KotaBlitar?
21. ApakahpengawasanyangdilakukanolehDPRDdipublikasikanKotaBlitar?
22. Bagaimana cara masyarakat untuk melihat hasil dari pertanggungjawaban keuangan daerah KotaBlitar?

23. Siapa saja yang menjadi sasaran dari APBD Pro Rakyat KotaBlitar?
24. Kebijakan apa saja yang diambil dalam pengimplementasian APBD Pro rakyat Kota Blitar?
25. Program apa saja yang ada dalam kebijakan APBD Pro Rakyat dalamBidang pendidikan KotaBlitar?
26. Berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan APBD Pro Rakyat dalam Bidang pendidikan KotaBlitar?
27. Bagaiaman rinciannya kebijakan APBD Pro Rakyat dalam Bidang pendidikan Kota Blitar?
28. Bagaimana proses pengimplementasian di tiap programnya APBD Pro Rakyatdalam Bidang pendidikan KotaBlitar?
29. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian tiap program APBD Pro Rakyat dalam Bidang pendidikan KotaBlitar?
30. Bagaiaman cara mengatasi kendala tersebut pengimplementasian tiap programAPBD Pro Rakyat dalam Bidang pendidikan KotaBlitar?
31. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan KotaBlitar?
32. Siapa saja kah yang terlibat dalam implementasi APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan KotaBlitar?

Masyarakat Dan NG

1. Apa yang saudara ketahui tentang APBD pro Rakyat? Dari Mana suadaramengetahui istilah APBD prorakyat?
2. Apa saudara ketahui tujuan dari APBD prorakyat?
3. Apa saudara tahu Sejak kapan APBD Pro Rakyat diterapkan di KotaBlitar?
4. Bagaimana pendapatan saudara terhadap pendapatan daerah dalam APBD ProRakyat KotaBlitar?
5. Bagaimana pendapatan saudara terhadap belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat Kota Blitar?
6. Bagaimana pendapatan saudara terhadap tentang pola realisasi belanja daerahdalam APBD pro Rakyat KotaBlitar?
7. Bagaimana pendapatan saudara terhadap alur dalam penyusunan APBD ProRakyat KotaBlitar?
8. Apakah sauadar terlibat dalam penyusunan APBD Pro Rakyat KotaBlitar?

9. Bagaimana pendapatan saudara terhadap pendapatan daerah dalam APBD ProRakyat dalam bidang pendidikan Kota Blitar?
10. Bagaimana pendapatan saudara terhadap belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan Kota Blitar?
11. Bagaimana pendapat saudara terkait adanya APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan KotaBlitar

TRANSKIPWAWANCARA APBD PRO RAKYAT

Pewawancara : Peneliti

Narasumber : Eka Atikah (Sekretariat DPRD KotaBlitar)

Waktu : Juli2020

Pertanyaan	Keterangan
<p>Apa yang dimaksud dengan APBD Pro Rakyat? Apa dasar hukum b litar melaksanakan APBD Pro rakyat?</p>	<p>APBD Pro rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Bliar dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat KotaBlitar. Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kota Blitar No. 9 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 dan Peraturan Daerah Kota Blitar No 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomer 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.</p>
<p>Apa Tujuan Dari APBD ProRakyat?</p>	<p>Tujuan dari APBD Pro Rakyat adalah menjaga agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat dengan tujuan yang lebih khusus sebagai berikut:Meningkatkan kerukunan umat beragama, Meningkatkan akses, kualitas, tata kelola pendidikan, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif, Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak, Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai denganprinsip-prinsip pemerintahan yangbaik</p>
<p>Sejak kapan APBD Pemerintah ?</p>	<p>Sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar No.9 Tahun 2010, APBD Pro Rakyat di terapkan mulai Tahun 2010.</p>
<p>Bagaimana gambaran umum pendapatan daerah dalam APBD Pro</p>	<p>Pada periode tahun 2015 – 2019, realisasi pendapatan daerah Kota Blitar cenderung meningkat yaitu periode 2015 – 2019dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 5,2 %. Apadun Gambaran Pendapatan daerah sebagai berikut : 2015 :769.743.723.207</p>

Rakyat Kota Blitar?	2016 :847.187.760.012 2017 :850.942.359.241 2018 :894.409.176.023 2019 :940.723.250.100
Bagaimana gambaran umum belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat KotaBlitar?	Berikut ini gambaran belanja daerah dalam rentang waktu 2015 – 2019 di Kota Blitar. 2015 : 782.148.792.596 2016 :857.795.223.706 2017 :784.297.309.172 2018 :811.042.753.124 2019 :974.726.671.816
Bagaimana pola realisasi belanja daerah dalam APBD Pro Rakyat Kota Blitar?	Pola realisasi belanja daerah selama kurun waktu 20152019 memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,17 persen. Pada Tahun 2017 pertumbuhan belanja menurun sebesar 8,6 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 857795223706 menjadi Rp 784297309172 pada tahun2017.
Bagaimana alur dalam penyusunan APBD Pro Rakyat Kota Blitar ?	APBD Pro Rakyat dalam konsep perencanaan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 dan dalam konteks anggaran mengacu pada PP 12 Tahun 2019. Dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RAPBD, sampai dengan APBD. Begitu pula pada proses perubahan melalui RKPD, KUA PPAS dan APBD.
Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD Pro Rakyat Kota Blitar?	APBD Pro Rakyat melibatkan multi stakeholder. Masyarakat dan lintas sector dilibatkan dalam musyawarah perencanaan secara berjenjang mulai dari RW. Kelurahan, Kecamatan, forum perangkat daerah, sampai musrenbang di tingkat Kota Penetapan RKPD dengan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Pembahasan KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
Bagaimana alur dalam penyusunan APBD Pro Rakyat dalam bidang Pendidikan Kota	Sebagaimana penyusunan APBD Kota Blitar pada umumnya, untuk bidang Pendidikan pun alunya dimulai dari forum-fonum musrenbang, pikir sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Blitar ?	
Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD Pro Rakyat dalam Pendidikan Kota Blitar ?	Penyusunan APBD Pro Rakyat dalam bidang Pendidikan melibatkan multi stakeholder mulai anggota DPRD, Dewan Pendidikan, Kepala Kepala Sekolah, Komite - Komite Sekolah dan Kemenag dalam forum Musrenbang.
Bagaimana Langkah pemerintah pusat untuk mempercepat penyerapan belanja daerah dalam bidang Pendidikan Kota Blitar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke Daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di Daerah. 2. Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan Pemda diperbankan. 3. Memberikan reward berupa Dana Insentif Daerah dan punishment melalui kebijakan konversi dana bagi hasil atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar. 4. Sosialisasi dan melakukan rapat-rapat kerja terkait upaya percepatan penyerapan belanja daerah bidang Pendidikan. 5. Menerbitkan juknis pengelolaan dan realisasi keuangan bidang Pendidikan.
Apa kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan belanja daerah dalam bidang pendidikan Kota Blitar ?	<p>Diantara kendala yang dihadapi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan (siswa) sekolah dalam jumlah besar sehingga dalam layanan yang diberikan memerlukan penanganan teknis yang serius Misalnya dalam hal pemberian seragam gratis perlu pengukuran setiap anak dengan ukuran yang beragam. 2. Jadwal tahun ajaran sekolah perlu disinkronisasi dengan jadwal penganggaran. Terutama dengan jadwal tender agar fasilitas pendidikan untuk siswa bisa dirasakan siswa segera setelah tahun ajaran baru
Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pengelolaan	Pengawasan keuangan dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah dan BPK RI yang setiap tahun melaksanakan pemeriksaan. Selain itu, sesuai dengan pasal 153 UU 23/2014, DPRD juga melakukan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan peraturan tentang pendidikan gratis.

keuangan daerah Kota Blitar dalam bidang pendidikan ?	
Apa dasar hukum dalam mengawal pengutaraan daerah Kota dalam bidang pendidikan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 tentang BPK 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembicaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bagaimana prosedur pengawasannya ?	<p>Melalui proses Sistem Pengendalian Intern. Artinya melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Melalui proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>c. BPK juga melakukan Pemeriksaan kinerja, artinya pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.</p>
Siapa saja yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar dalam bidang pendidikan?	DPRD melalui fungsi pengawasan, BPK, Inspektorat Daerah

Apakah pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan DPRD Kota Blitar di Publikasikan ?	Kegiatan-kegiatan penyampain – penyampaian rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan dalam rapat – rapat paripurna disiarkan secara langsung melalui radio Pemkot Blitar (Mahardika FM) dan atau media surat kabar dan media elektronik lainnya.
Bagaimana cara masyarakat melihat hasil dari pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Blitar?	1. Melalui publikasi perda pertanggungjawaban APBD yang diunggah pada situs blitarkota.go.id 2. Melalui saluran informasi publik pemerintah yakni PPID pemerintah kotaBlitar.
Siapa saja yang menjadi sasaran dari APBD Pro Rakyat Kota Blitar ?	Sasaran APBD Pro Rakyat Kota Blitar adalah masyarakat Kota Blitar.
Program apa saja yang ada dalam kebijakan APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan?	Seragam Gratis, Sepeda Gratis Dengan Sistem Pinjam Pakai, Angkutan Sekolah Gratis Meliputi 7 Armada Bus Dan 11 Angkutan Kota, Spp Gratis, Daftar Dan Daftar Ulang Gratis, Uang Gedung Gratis, LKS Gratis, Kartu Kendali Ibadah, Sampul Raport Dan Sampul Ijazah, Study Set Untuk Anak TK, Foto Raport Dan FotoIjazah
Berapa besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan APBD Pro Rakyat dalam bidangpendidikan?	Belanja urusan pendidikan di tahun 2020 sebesar 234.890.210.383 dari total belanja daerah 1.025.225.063.019 atau 22,91%. Belanja urusan pendidikan di tahun 2019 sebesar 251.061.353.367 dari total belanja daerah 972.395.129.547 atau memiliki rata-rata sebesar 25,82%. Dan total anggaran khusus untuk sekolah gratis tahun 2019 sebesar : 14.943.442.200.
Bagaimana rincian kebijakan APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan	Penerbitan payung hukum dalam bentuk peraturan Kepala Daerah, Kesepakatan bersama antar pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar dalam hal alokasi anggaran, Pemenuhan mandatori budgeting dalam bidang pendidikan, Sosialisasi rutin kepada siswa, orang tua / wali muridtentangteknikkebiajkanpendidikangratis,Kerjasamadenganmultistakeholderdalam

Kota Blitar?	pelaksanaan, Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan gratis, Merespon masukan kritik dan saran lewat layanan pengaduan
Bagaimana respon masyarakat terkait adanya APBD Pro Rakyat dalam bidang Pendidikan?	Perlu penelitian khusus lebih lanjut untuk memvalidasi respon masyarakat terkait APBD Pro Rakyat di Kota Blitar. Namun dampak positif yang jelas dirasakan adalah berkurangnya beban pengeluaran masyarakat Kota Blitar untuk biaya sekolah sehingga dapat digunakan untuk kepentingan yang lain.
Siapa sajakah yang terlibat dalam implementasi APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan Kota Blitar?	Implementasi APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan Kota Blitar melibatkan multi stakeholder. Di antaranya : pemerintah dan DPRD Kota Blitar, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Siswa Sekolah.

TRANSKIP WAWANCARA 006

Pewawancara : Peneliti

Narasumber : Muhammad Sidiq,

S.Sos., MAP (Kepala

Dinas Pendidikan) Waktu : Juli 2020

Pertanyaan	keterangan
Kalau sw asta ga k masukpak?	Posga (Program sekolah gratis) pak. Yang mungkin bisa diangkat di kita ini pak proyeknya PLA ini mungkin bisa di angkat. Pelayanan autis kan layanan untuk disabilitas itu free pak tidak membayar jadi memberikan akses keterampilan dan sebagainya. Itu anaknya sekitar 300 sampai 400 an .
Itu dari kota apa	Dari kota ada dari luar kota juga ada
Boleh?	Boleh, bahkan ada yang dari luar jawa juga ya pak
	Itu juga salah satu unggulan kita.
Akses, mutu, tata kelola	Aksesitu memeberi kesempatan untuk rakyat bisa mudah mengikuti pendidikan. Akses itu untuk kemudahan anak-anak itu memperoleh pendidikan warga-warga itumemiliki pendidkan

	jadi misalkan apa proses-proses, misalkan lembaganya, jumlah lembaganya cukup untuk pendidikan siswa, jadi jangan sampai ada yang tidak terfasilitasi. Kalau mutu kan gabungannya dengan apa namanya pelayanannya jadi tidak hanya dari segi sarananya saja tetapi juga dari kompetensi gurunya itu kan juga akar mutu.
Itu kan mutu, yang ke tiga tata kelola.	Tata kelola jadi pengelolahannya seperti apa, pelayanan yang baik itu.
Lajeng pembangunan fisik e pembangunan fisik sekolah wonten nggeh keuangan fisik sekolah?	Keuangan fisik sekolah itu kita kan rutin pak setiap tahun kita lakukan.
Anggarannya?	Anggarannya itu mecah mecah sulit ketika keseluruhan pak jadi .
Keseluruhan ya ?	Iya kita lihat yang dilayani kita ini kan pendidikan dasarnya sampai SMP ya pak ya, terus pendidikan usia dini, sama pendidikan diluar sekolah itu yang kita tangani. Kemudian untuk di kita itu pembangunan-pembangunan itu sarana dan prasarana pemenuhan sarana dan prasarana penggunaan prasarana itu tidak hanya membangun tapi untuk perawatan dan sebagainya, jadi kalau misalkan njenengan tanya jumlahnya berapa ya nanti metani satu satu, tapi kalau secara umum dinas pendidikan berapa itu mungkin bisa pak, tapi metani satu-satu.
Menawari nganu pak dalam pelaksanaanya itu ada permasalahan-permasalahan apa apa saja kira-kira yang pernah ditangani?	Dalam melaksanakan APBD Pro Rakyat, sementara berjalan dengan lancar. Jadi gini intinya APBD Pro Rakyat itu bisa berjalan dengan pemangku kebijakan brati kan dari kepala daerah terus dari dewan. Jadi selama kedua itu berjalan beriring insya allah, selama ini kita tidak ada masalah yang konteks.
Model investasi walikota khususnya APBD Pro Rakyat di bidang pendidikan?	Kalau modelnya bagus kan mudah ditularkan. APBD Pro Rakyat itu kependidikan itu intinya adalah bagaimana anak-anak itu masyarakat Kota Blitar itu terfasilitasi intinya itu pak jadi meningkatkan akses tadi jadi arahnya kesana. Akses itu bukan jarak tapi kemudahan pelayanan pendidikan arahnya kesana anak-anak Kota Blitar ini mendapatkan sekolah sebenarnya seperti

	itu pak.
menawari keterlibatan masyarakat selain dari NJO sing dilibatkan dalam pendidikan	CSR, Contoh sederhana ini pak seperti bis sekolah pak, bis sekolah itu juga untuk mempermudah akses juga sebenarnya. Itu kan hubungan bis sekolah juga dari CSR sebageian , jadi tidak mungkin dari kita dari dinas pendidikan kita juga kolaborasi dengan dinas yang lain seperti Dishub dengan yang dipertigaan dekat dengan anak-anak , tapi intinya kan kalau APBD Pro Rakyat itu kan konsepnya adalah bagaimana plat akses yang terealisasi kan gitu akses, mutu dan tata kelola.
Titik berat APBD Pro Rakyat dalam bidang pendidikan jaminan sekolah gratis.	Akses itu pak, sekolah gratis itu kan akses itu iya jadi anak-anak bisa terlayani pendidikannya sampai jenjang , karena undang-undang itu kita sampai SMP. Meskipun arahnya merambah.
Menekan angka putus sekolah?	Iya menekan angka putus sekolah, seperti di BKBN itu kan ada semua yang paket A B C , kalau paket A B C itu kan masih ranahnya di kita.
Kalau menawari paket sepedah gratis yang kemarin itu gimana pak prosesnya?	Pinjam pakai, itu berapa jumlah terus itu nanti sistemnya ketika dia rusak dikembalikan lagi atau nanti kalau sudah lulus SMPnya. Karena itu sistemnya pinjam pakai berarti harus setelah dia selesai lulus berarti dikembalikan itu kan berputar terus. Terus kemudian sekolah yang mengelolanya , terus perawatan ada disekolah anggaran pembiayaan perawatan sepedah. Itu dalam rangka akses juga itu arahnya kesana
Kalau kegiatan mutu sendiri untuk guru apa pak?	Banyak pak jadi ini contoh yang sudah dilakukan temen temen nanti njenengan butuh dokumen- dokumennya bisa nanti apa ke Mendik. Jadi untuk peningkatan mutu guru jadi kan ada pelatihan setiap tahun kita lakukan pak dilakukan oleh kita sendiri biaya APBD juga dibiayai yang dari luar. Tapi mungkin kalau kita juga suka banyak yang diarahkan ke guru termasuk disini kan ada namanya komunitas jadi istilahnya pemebelajaran komunitas gitu, PKB lah

TRANSKIP WAWANCARA 09

	<p>Cenderung membuat model ya, model model yang bagus digunakan orang lain. Kalau seperti yang saya sampaikan kemarin yang memungkinkan itu yang mix karenayanggratis itu begini, begitu daftar ulang itu disodori apa itu format isian blanko silahkan mengisi mau ikut yang gratis atau ikut yang membayar, karena ya gak papa kalau ikut yang membayar. Artinya biaya yang gratis itu untuk</p>
--	--

	<p>subsidi aspek lain, dari aspek kan kalau yang gratis itu lebih kepada akses karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu manfaatnya untuk mendekatkan jarak. Jadi mendekatkan jarak itu tidak hanya secara fisik dalam arti jarak sekolah tetapi persepsi pikiran orang tua kadang-kadang sekolah mahal gak kuat menyekolahkan, ketika mendapat subsidi dari pemerintah berupa keringanan sekolah gratis itu kan menjadi wes sekolah e wes. Lebih ringan persepsi iya dan itu yang menjadi penghargaan dari pemerintah karena iya itu ikut di dalam apaya.</p> <p>Ada beberapa, sebenarnya itu berpengaruh pak alokasi anggaran pada apa itu pasti ada. Jadi gini misalkan indeks demokrasi tinggi itu kan akan ngaruh, nah ini bentuk penghormatan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya gratis dalam rangka meringankan tapi juga reward . Nah anggap saja sepertiga ya dari biaya gratis itu masyarakat itu bisa membantu ganti membantu tidak mengambil itu, itu sudah cukup tinggi artinya bisa membantu. mungkin kalau sekarang tidak terlalu banyak.</p> <p>Mestinya kan kalau sudah terseleksi dari sekolah atau dari level kecamatan ke tingkat kota, itu kan pemusatan latihan itu harus full sudah tidak boleh kurang dari pelatih dia tingkat daerah atau mungkin koni lah yang menangani baru itu nanti naik, nah kalau untuk itu kan belum nah misal contohnya atau untuk guru berprestasi sudah lepas seleksi disini semestinya untuk dia naik ke provinsi kan ada pendanaan dari daerah atau ada juga guru kita yang menemukan PTK tulisan karangan sebenarnya untuk mengakredit saja awalnya. Penelitian tindakan kelas tapi kalau itu bagus diterbitkan untuk referensinya orang nah itu kan bisa dibiayai mutu. Aksesnya sudah bagi yang belum mampu itu subsidi dengan apa biaya rupiah bagi yang sudah mampu itu dia tidak dapat itu tapi kan dapat kualitas.</p>
Bisa masuk mix	<p>Iya bisa mix, ini menurut saya kalau menurut njenengan tentu tidak hanya saya yang menjadi apa itu pembeberi informasi tapi kalau menurut saya untuk saat ini hasilnya sudah pakai mix gitu ,kalau bisa pakai mix nanti bisa naik ke tata kelola dan mutu biayanya.</p>
Tata kelo la nol tingkat	<p>Kalau tata kelola lebih ke manajemen kalau secara umum bukan uang tapi ke manajemen secara umum misalnya menyusun sistem pendidikan kita ini supaya punya SOP yang tingkat daerah, misalnya saja gini penerimaan siswa baru gitu aja itu kan dari pemerintah pusat kan berapa persen misalnya 5 persen itu untuk prestasi 5 persen untuk luar daerah dan yang 10 persen itu untuk zonasi.</p> <p>Misalkan menata yang 5 persen itu untuk apa itu harus sistem, misal yang di luar itu untuk apa jangan untuk sembarangan, yang dari luar itu yang harus nilainya tinggi, yang berprestasi punya</p>

program tertentu, misalnya dia hafiz bisa masuk atau mungkin misalkan dia berprestasi sebagai atlet atau apalah yang mungkin prestasi atau malah sebaliknya dia sudah gak diterima di mana-mana ada contoh di daerah kuningan itu Jl. Madura itu bingung mau sekolah kemana gitu karena jauh mau ke arah selatan jauh mau ke talun juga jauh, nah untuk itu semestinya ada persembahan untuk tetangga kita.

Nah jadi untuk kabupaten yang belum dapat sekolah nah sistemnya itu yang perlu diatur. Nah bekerjasama dengan kabupaten. Kalau sinyal hospot tidak ada sinyal disitu. Jadi kalau mau ke ludoyo jauh mau ke garum juga jauh, di srengat jauh lha dimana dia SMP ne sulit to. Seperti itu untuk adek-adek kita yang di sekardangan . jadi tidak harus yang berprestasi saja. Nah yang seperti itu kan perlu disusun sistemnya nah nyusun sistem ini bagian dari tata kelola insya alloh. Kemudian gini ini sesuai dulu yang pernah kami lakukan , guru itu sering terjebak penyusunan angka kredit itu itu saja padahal banyak variannya sebenarnya cukup satu tahun satu aja ya yang mayor tapi dia sulit untuk jadi satu karena harus seminar, terus gini kenapa tidak profesi saja yang PGRI atau apa jadi organisasi yang mengadakan itu bisa ditandatangani oleh dinas itu sudah sah satu kredit , jadi untuk naik pangkat empat tahun sudah bisa.

Mengelola yang seperti itu perlu misalkan seperti ini contohnya untuk yang ibarat beli pecel itu menu utamanya dari APBD itu tata kelola jadi kursus atau pelatihan itu ada sharing dari teman-temannya dipastikan ada guru inti, dia sharing mendapatkan honor. Tapi ketika dia pecel terus tambah telur hehe dia bayar sendiri gitu misalnya karena dia punya uang dari sertif untuk peningkatan mutunya dia to jadi di mix antara biaya pokok dari pemerintah yang hasil penghematan untutk tata kelola tadi dibantu dari dia sendiri dan temannya mungkin tergabung jadi satu kemudian mengundng profesornya dulu di kampus untuk hadir jadi misalnya olahraga gitu itu mau menggil mau mejadikan narasumber bisa saja tukang pijet olahraga itu kan juga khas itu kan mijetnya khas ya seperti itu bisa bayar sendiri dari hasil tata kelola . Selama ini kan nanti gak laku pak , nanti kepala dinasnya gak mau tanda tangan pak, ini kurikulumnya gaada sekian jam pak, ya nanti diatur . kadang gini guru terjebak pada nulis buku padahal tidak harus bisa saja guru seni misalnya itu dia membuat vidio tutorial tancep atau apa-apa gitu yang nari gitu lo itu menerangkan filosofinyasudah jadi media pembelajaran nah yang seperti seperti itu meyusun perangkat-perangkat itu memenuhi gak kaidah-kaidah keilmuannya. Misalkan harus menghadirkan untuk diseminarkan dari UM atau

	<p>mungkin dari Koni lain itu bagian dari tata kelola.</p> <p>Jadi tata kelola daam arti luas tidak hanya ketik ulang tapi juga seperti itu juga bisa kayak mendisiplinkan . Saya sering waktu itu ya anak saya itu di PolPP ditangkaplah itu kan kalau orang luar kan cenderung ditutupi nanti kita jelek justru kita kelola menjadi sesuatu yang bisa ditonjolkan bahwa kita disiplin kita ini jangan sampaian tertangkap seperti ini. Tapi tidak harus menghukum anak itu di Shooting muka endak endak mungkin disamarkan atau apa , jumlah usia, dan tidak menunjuk menohok ke SMP 7 SMA enggak. Tapi justru dikelola tapi ngelolane itu bagian dari tata kelola karena media perlu diajak bicara perlu adifing untuk memebeli berita Itu bagian dari ya apa saja yang terkat dengan tata kelola memang sudah rigid ya dari pusat untuk di daerahkan i perlu tata kelola tertentu maksudnya gini bagaimana supaya yang rigid yang pakem ini bisa jadi body kegiatan kalau dari sana kan harus angka sekian, tapi untuk mencapai itu guru maupun yang siswa ada juga kan yang gini waktu itu kan pemberlakuan Full day itu kan menjadi masalah di SD ketika yang laki-laki yang pria itu ke masjid sebagian dari pendidikan penguatan karakter lha yang perempuan lo ngapain lha kan gak di hitung jamnya kalo yang guru laki-laki itu mendampingi itu kan dihitung jam tapi kan yang perempuan tidak di pusat tidak diatur maka dari itu kita beri materi-materi keputrian bagaimana menggoreng telur bagaimana marut kambil bagaimana apa itu nah itu yang seperti itu bagian dari tata kelola kita. Sehingga guru kita yang perempuan itu dapat kridit atau tidak minpalingtidakyangpriayanglaki-lakijugadapatpoinkarenajugamengantar keyangputraitu ke masjid nah yang perempuan kan tidak dapat apa apa makanya diatur untuk membodykan supaya jadi bentuk benar-benar mempunyai nilai nilai tertentu banyak banyak yang dari tata kelola .</p>
Itu masuk implementasi.	Iya maksud saya semakin kecil gitu yang menerima subsidi gratis ini , ini

	mohon maaf lo pak gini urusan saya bukan biting ya jadi saya tidak berkaitan dengan jumlah suara marai panjenengan peneliti.
Mohon maaf pak mungkin saya akan dari anggaran yang sudah dianggarkan kalau tadi mengadakan	ini Ini kan ingin memanfaatkan yang gratis tadi bukan menambah anggaran to , anggaran yang sudah ada itu untuk mempunyai nilai yang lebih manfaat itu digunakan untuk sisi lain. Kalau menambahkan kan bisa bisa saja wong motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi kan gitu ya, e banyak hal atau misalkan sekolah gak gratis tapi untuk membantu sekolah kan bisa saja nah kalau ini kan tetap persennya tetap tapi mempunyai daya lain, mix saya darisitu.

<p>bahwasanya harus ada mix gitu apakah masih kurang? pertanyaannya begitu ketika mix nya yang campuran dengan masyarakat ada gak gitu lo.</p>	
<p>Tampaknya yang diurusi fokusnya ke akses.</p>	<p>Kan juga tidak ingin bermasalah dengan visi lain , bisa saja misalnya karena komitmen pimpinan dialihkan kesana tapi kan menjadi dagingnya berkurang korporasinya berkurang, jadi ini diibaratkan kue bisa saja kita ngiris kue orang lain dimasukkan ke sini tapi kan yang sini berkurang.</p>
<p>Jadi ini merubah di kajian perda?</p>	<p>Kita gak sampek perda sampek SK, Intinya adalah kajian SK yang ini. Kan dinamis to kebijakan itu jadi dinamis jadi ketika itu lebih bagus ya itu bisa di seandainya kabupaten langsung melakukan mix gak papa apa daerah lain bisa jadi misalnya kabupaten punya kuota , saya punya persekolah untuk gratis untuk 300 siswa bisa berarti misalnya SMP Wlingi gitu ya itu sekitar disana kan separone 10 berartikan 310 jadi misalnya sepertiga dulu saja sepertiga dulu saja. Artinya kelas 9 kelas 8 kelas 7 ini 100 100 100 gini misalnya iya itu kan sepertiganya gak papa. Berarti itukan otonomi sekolah untuk membuat kebijakan baru sekian gitu merujuk padaSK</p> <p>Nuwun sewu jadi kan gini penelitian ini memang ini penelitian ini harus masuk ke politik anggran juga , kalau otoritas untuk menentukan A B C nya itu bisa diserahkan ke sekolah dengan panduan misalnya panduannya orang tuanya pendapatnya ini bebas itu hanya cara metode untuk merekrut jumlah 100 itu ya. Tetapi alokasi itu bisa dilakukan di sekolah langsung jadi gini penggunaan anggarannya Dinas Pendidikan kuasa pengguna anggrannya itu bisa disekolah masing-masing sekarang fungsi kepala sekolah sudah jadi manajer kan.</p> <p>Iya tinggal ngitung saja jadi misalnya di global $100 \times 2.000.000 = 400.000.000$ diberikan khusus untuk SMP sana untuk pendidikan gratis jangan untuk mbangun ndak boleh nahitu yang diberi rambuuntuk siswa ndak boleh untuk kamar mandi ndak boleh untuk membangun kelas baruitu gak</p>

<p>Ini untuk yang kabupaten?</p>	<p>boleh. Nah itu mampu insya alloh kalau berangkatnya dari sana.</p> <p>Yang lain juga bisa, maksud saya kalau panjenengan nanti kan bisa dijadikan re jadi bisa saja ini diefektifkan kalau yang belum mau berangkat ya silahkan de tertentu toh kita belajarnya gak langsung keseluruhan. Nah bisa saja komoditinya rata atau pemeratannya tidak trlalu tapi komoditinya besar.</p> <p>Ini seperti di perguruan tinggi UKT ya, untuk formasi dari ke khasan masyarakat Ekologinya seperti apa pak ketika kita melihat kebijakan dari pemerintah apakah jadi seolah atau gimana ketika kita nanti membuat model baru juga perlu antisipapa apa.</p> <p>Ini pengamatan saya , kalau SMP seperti SMP 1 kalau SD seperti SD Kepala Bendogerit 1 satu itu tidak terlalu tertarik dengan sekolah gratis , ini bukan dari mengamati langsung buktinya itu ketika orang tua diberi arahan itu gak patek wong saya mengamati sendiri. tapi ini boleh saya bertanggung jawab atas yang s</p> <p>Kalau SMP 9 itu nguematne tenanan nah mungkin ini juga karena derajat eko Meskipun sekarang sudah zonasi tapi tetep masih muncul kaya gitu mungkin ana kalau sekarang terbuka lebar dulu kan sempat ada perdebatan diawal-awal sana pasar templek i ngikuti pelajarane cah SMP 2 , yo sebaliknya lha gurune iso gak r gurunya bisa gak mengasuk adik-adik kita yang kurang beruntung dari sisinilai akademik , lha makanya kalau sikap itu ya ya beragam sangat beragam kalau sec untuk gratis ini, karena seperti yang saya sampaikan.</p>
----------------------------------	--

**TANSKIP
WAWANCAR
A 010**

	<p>Bahkan gini dia itu kalau tidak datang ke singgasana itu sebenarnya single taklin, tidak hanya gratis ini saja tapi begini pasrah orang tau kepada pemerintah ketika dikelola sekolah itu yang disampaikan jamannya pak anis itu, kalau dirumah ya p</p>
	<p>ngelola, itu namanya jadi ada ikatan sekolah bertanggung jawab kepada anak di dirumah orang tua bertanggung jawab terhadap pengasuhan yang ada di rumah i terpenting.</p> <p>Ada yang seperti itu mbahnya kan salaman gitu ya orang tuanya datang upacara benar dia mengungkapkan bu kulo titip anak kulo ada yang seperti itu , niki nome menghubungi kulo, sanu pamite sekolah mengke mboten dugi sekolah, ada yang s waktu itu ada biaya yang tidak gratis sama sekali ada yang melekat kaya osis gitu uangnya tidak dibayarkan, berangkat sekolah itu yo ditutne mbah e sampek ke ga tapi yo gak masuk, ini yang PLA begini.</p>
<p>Enggeh PLA ini memang yang kekhasnya blitar katanya memang gitu nggeh, jadi ada juga yang lain</p>	<p>Jadi gini pendidikan itu hak asasi setiap orang, insan itu berhak untuk menda makanya adek-adek kita ini ada lembaga sebenarnya yang tepat itu Pusat Disa Autis. Karena autis itu spektrum tidak hanya autis pasti dia ada ketunaan yang misalnya saja kebetulan dia autis tapi graitannya kurang bagus brati seperti itu m di SLB tapi ada yang dia autis tapi gritanya bagus lebih dari 80 dia masuk di imp</p> <p>Jadi kita punya sekolah implusi sebenarnya ada aturan induknya juga ada idealny implusi tapi kan tidak semua sekolah itu iklimnya cocok, karena anak ketunaan anak indigo misalnya itu harus sekolah tertentu dan kita harus benar-benar bisa anak itu untuk tidak minder berinteraksi dengan anak yang lain, ada contoh yang sebenarnya saya bisa komunikasikan kepala sekolah SMP 4 ada anak itu dulu di S setelah di asesmen dia masuk pakai kursi roda kalau jalan nah itu sekarang olimpiade makro UNBK juara 2 sejawa timur jadi sangat tidak terganggu jadi mnegantar dadi tidak ada set ada guru yang mendampingi dadi masuk kel orangtuanya di luar tapi ada juga tapi kadang ada juga yang kududitunggoni.</p> <p>Ini berarti disabilitas tanpa ada fisik maksudnya kelainan. Ada juga anak itu psikologisnya mohon maaf ini dia sakit sejak kecil , terus kebetulan orang tuany dibangkitkannya kalau tidak di sekolah impulsif itu sulit karena anak SLB akan ce yang ke tidak Impulsif dia akan minder maka harus di sekolah yang implusi ya anak nah ini perlu dibiasakan.</p>
	<p>Jadi misalkan mengajari teman-temannya kalau naik tangga ya disurung disini bel Perdana Kepnajeilor 3 ada anak yang namanya savina tulang belakangnya yang l tidak bisa jadi datang digendong orangtuanya itu duduk pulang dibonceng oran sudah gitu aja, tapi sekarang sudah bisa kalau pancasila itu ikut berdiri hormat i terakhir saya tanya ke kepala sekolahnya itu bisa ikt eman-temanya jo lintang itu sama semangat hidup luar biasa jadi gutunya harus tlaten, kepala sekolahnya tla juga itu yang mestipernah juga ada yang anak kabupaten mlaku itumlunyal, jadi anak seperti dianggap tidak umum juga jadi ngomong itu bahasa inggris anak ke inggris memang autis tapi punya kelebihan ndak kelihatan,</p>

<p>Caper brati maksudnya.</p>	<p>Dia labil, labilnya itu yang seperti ini. Waktu itu pernah menyajikan disunat di khitan itu di khitan itu orangtuanya aja tidak berani sudah masuk usia itu mungkin jadi dengan prodi kesehatan yang ada di perawatan itu kemudian dengan rumah sakit, anak itu kan nurutnya sama terapisnya, kalau nanti kalah mesti gletak disunati. Kalau gujer jadi orang tuanya nunggu disitu kemudian dokter dan teamn teman prodi itu yang menganu pelilakunya itu terapisnya. Nah itu kan tidak sederhana, terus keprodi nanti kalau biusnya sudah habis gimana.</p> <p>PLA nya awal berdirinya di bondowoso itu swasta yang disini itu sebenarnya bukan hanya lembaga untuk terapi saja sekitar 7-8 bulan . Anak itu mulai masuk di asesmen, saya itu wes ndak tlaten ada yang datang itu nyeklekne cetekan lampu itu sak PL gitu, ternyata itu bagian dari penelitan o anak itu begini , anak itu seperti ini. ditentukan anak ni nah langkah terapinya ditentukan. Kalau dia sudah sesuai tahapannya itu masuk sekolah kelas transisi nanti di kelas transisi itu diamati n di sekolah umum atau di sekolah SLB kalau dari PLA itu bukan di keluarkan terapinya sudah selesai kemudia dia itu ganti mentor ke orang tuanya untuk di rumah biasanya seperti itu. Sebenarnya di PLA itu sudah ganti orang lagi bukannya SLB bukan kalau itunya itu di sekolah implusi atau di SLB dalam pantauan BLK</p>
<p>Wo ada asrama ya pak ya?</p>	<p>Tidak selalu asrama tapi disana disediakan tempat istirahat karena kan tidak hanya anak kota disediakan angkutannya ada. Nah angkutan yang dari perhubungan itu free juga mendekatkan jarak. Kalau yang dari luar memang ya perlu karena berdirinya untuk anak kota kalau yang di kulom progo itu se Jawa tengah tempatnya di kulon</p>

	<p>tengah, nah itu dekat rumah sakit jadi kalau ada sesuatu langsung diterapi jadi meyakinkan bolongannya gitu, karena sebenarnya kalau PLA ini fifty-fifty pendidikan dan nanya. Cuma program itu yang mengangkat dari kementerian pendidikan kebetulan yang bupati nya dokter lebih bagus gitu cara mengelolanya, nah gara-garanya begini karena punya teman istrinya banyak disana itu banyak geng yang yang kebetulan banyak disana sehingga disana banyak, artinya hampir sama Exportnya juga hampir sama . kalau di sekolah pak hanya lembaga untuk menerapi ya mempersiapkan dia nanti masuk ke</p>
<p>Atau dikembalikan orangtua di ke</p>	<p>Akhirnya dikembalikan ke orang tua , orang tua kan bisa mengetahui ada kan orang tua komplain “enggak anak saya gak autis anak saya” nah itu boleh ada Second opinion di tempat lain , kalau kami sesuai opini jadi indikatornya ini , kan dia masuk distu di rumah orangtuanya protes , lha gak papa</p>

**TRANSKIP
WAWANCAR
A 011**

kualitas terendah. Kualitas sendiri tidak hanya diukur dari dia juara atau tidak dalam lomba kan ini yang menjadi berbeda kita pandangannya. Ada nuwun sewu daerah ada satu saja yang juara itu sudah kualitas sekolah itu berkualitas dan padahal tidak hanya satu itu untuk di dorong, biayanya itu, kalau yang kita siapkan ini kan kualitas mengangkat bersama-sama, kalau ada yang juara berarti ya kebetulan ada yang juara tapi tidak untuk yang tujuan utama.

Jadi kita lebih contohnya seperti yang saya ceritakan kaya sepeda yang mutu fisik anak, supaya nanti ketika ikut tes TNI fisiknya kuat mentalnya kuat karena kan dengan bersepeda kalau diantar saja kan gopok itu kan jadi gak mandiri diantar saja atau naik angkutan yang berbayar itu tapi ndak ndak, tapi ketika dia yang bersepeda kan dia bangun pagi, lihat persiapan sore, itu kan bentuk- bentuk kemandirian. Jadi dengan yang gratis ini harapannya masyarakat tetap bekerja keras terus di saving atau low investasi jadi misalnya setahun itu 2.000.000 per. Jadi mulai butuh daftar ulang, seragam sepatu, itu yang melekat pada anak itu buku LKS itu sekitar 2.000.000. Kalau di simpan mulai dari TK paud sampai lulus SMA/SMK itu sekitar 18.000.000 – 20.000.000. Semestinya bisa digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Harapannya, masyarakat masih tetap masih bekerja justru tidak terbebani atau terganggu dengan biaya yang harusnyadikeluarkan.

	Secara umum ketika hubungan orang tuanya gak harmonis itu dampaknya kepada anak. Mungkin ada program lain untuk menata ini supaya tetap ya tidak semua tapi secara umum seperti tidak harmonis orangtuanya itu biasanya membela ibunya. Nah cara membela ibunya ini mengok sekolah dampaknya pada anak sendiri. di intervensi supaya tidak dibully.
--	---

**TRANSKRIP
WAWANCAR
A 013**

Pewawancara : Peneliti

Narasumber : M. Trianto

(Walimurid sekaligus LSM

KotaBlitar) Waktu :

Agustus2020

Pertanyaan	Keterangan
	Kalo saya mungkin agak beda karena dasar saya itu auditing, dan hasil investigasi LKPP , KPK dan ICW pak.

<p>Dalam arti wes oke seneng terus saya cocok apa harapan mosok wes ngene tok. Perda yanglain?</p>	<p>Kalo saya itu begini APBD Pro Rakyat atau apa itu secara efektif ya. Da menghipnotis kesadaran politik rakyat. Dari dokumen-dokumen yang saya kumpu rame-ramenya ketika Samanhuji kemarin itu tahun 2010, menggambar nggen Rakyat pendidikan dan kesehatan gratis gitu kan setiap tahun. Ini mendapatka Jatim yang pada intinya dalam audit jelas ada beberapa kebijakan-kebijakan yan bantuan sepeda, bantuan spp gratis khususnya untuk pengadaan2 paling banyak pe sragam, tas, sepatu. Nah mungkin secara universal masyarakat memang sangat secara anggaran, masyarakat itu hanya dikasih dadunge tok taline tapi sapa kebijakan. Untuk pengadaan-pengadaan yang katanya APBD Pro Rakyat tersebut atau apappun ini adalah kebanyakn orang disekitar kekuasaan meskipun ada ger LKPSP tender itu ya pak, dulu jaman kita itu konvensional antara pengguna angga berhubungan tapi mulai tahun 2013-2014 itu ini undang-undang terkait pengada ini meminimalkan antara penawar danpenyedia jasa itu bertemu, artinya mereka itu hanya online. Tapi faktanya temuan-temu BPK ini adanya penyelewengan dalam konteks tender, orang nawar servernya</p>
--	---

	<p>tidak bisa masuk . Nah yang menang yang bisa masuk di leang ini hanyalah oran dengan konsekuensi sebelum lelang-lelang itu dilakukan sebenarnya sudah ada p berapa persen yo “oke” ngko gayane melok tender. Misalnya SMP 3 itu yang ke suap 3,4 miliar dari sekitar anggaran 24 miliar. Kemudian juga ada temuan-temu kemudian secara rekomendasi BPK RI itu kalo dikembalikan. 5 tahun terakhir k dan berakhir dengan OTT KPP,</p>
<p>4 tahun ya</p>	<p>Iya WTP. Acuan saya itu adalah data selalu melakukan penelitian, pengujian tiap kabupaten misalnya audit yang tahun ini, atau APBD tahun kemarin itu kita tem LPJ dana hibah dan bansos. Kalo kemarin ya pak ya sesuai dengan Kem bahwasanya LPJ untuk hibah atau bansos ini harus maksimal tnggal 10 janu berikutnya. Nah sedangkan, jadi kemarin itu kita di Pemkab terkait Bansos dan h dibodohkan dikasih hiburan begitu sehingga masyarakt lupa dengan arti poli artian yang sebenarnya. Jadi ini kalo saya nilai ya masyarakat terhibur, kasih rom pengadaan rombongan itu biasanya manipulatif. Saya suka dengan yang namanya . Cuma permasalahannya negara kita itu secara konstitusional dibawah hukum nam politik. Negara hukum tapi yang paling kuat supermasi politik.</p>
<p>Kalau sebagai orang tua melihat putranya. Yang ekonominya cukup apa diperlukan?</p>	<p>Justru seringkali menimbulkan polemik. Saya sebagai orangtua dikasih buku g berapa sih paling 15 ribu. Tas juga, sepatu juga itupun kualitasnya kurang bagus. pro rakyat ada skala prioritas ditujuukkan untuk orang-orang yang sangat me sertifikasi dan validasi yang kuat melalui kelurahan-kelurahan yang ada di kota l kan tanpa kualifikasi dan validasi. Artinya sebuah kebijakan yang ditopangdenganpelaksanaanyangluarbiasanantinyakaanjadibiasa.InikanAPBDpro luar biasa tanpa ditopang para pelaku kebijakan tadi jadinya tidak istimewa. dibantu pun bisa ngasih anaknya.</p>
<p>Pengadaannya itu dipasrahkan di sekolah atau di?</p>	<p>Untuk 200 keatas ini lelang dan tender, ada Pokja tapi setelah terindikasi yang m saja. Kemudian yang 200 kebawah ini melalui penunjukan langsung.</p>
<p>Oleh Pemda atau sekolah yang melaksanakan?</p>	<p>Lelangnya itu sekarang di bagian pembangun yang membawahi LPSE tersebut oleh OPD atau dinas masing-masing</p>
<p>Pendidikan ya?</p>	<p>Iya karna 1 adalah pendidikan. Kebetulan saya punya Software yang membuat I</p>

	<p>itu adalah linya LKPP saya pernah croscek itu kan setiap tahun muncul skor tertinggi korupsi. Saman disertasinya apa judulnya pak?</p>
--	---

<p>Model implementasi kebijakan walikota blitar dalam APBD pro rakyat. Jadi ndelok kaya apa modelnya, bagus apa enggak, akan tetapi ada penyempurnaan. Saya daaptkan dari pak sigit dulu kepala dinas yang lama, bagusnya mix, yang kaya tidak memerlukan itu tapi belilah dfasilitas yang lain apa wujudnya, itu yang nampaknya ber beda dengan model yang lain</p>	<p>Dalam konsepsi keadilan ada keadilan distributif dan ada keadilan kumulatif. Kalau keadilan distributif itu sama, kalau kumulatif itu berdasarkan kategori-kategori atau klasifikasi-klasifikasi. Artinya gini alangkah baiknya jika APBD pro rakyat ini menggunakan pendekatan bukan distributif tapi kumulatif. Seperti yang kelihatannya layak jangan dikasih sepatu. Jadi pemilihan kosnep keadilan sebuah teori dalam pelaksanaan kebijakan mempengaruhi endingnya bagaimana. Okelah keadilan misalnya saya di SMA 2 anggota komite disekolah. Kalau keadilan kumulatif dilakukan maka gejolak yang muncul saat upacara di SMA 2 bakal muncul seharusnya walikota menyampaiaikn “siapaun dari manapun yang sekolah di kota ora mampu tak ragati” itubagus</p>
<p>Itu kan sekarang yang nampak Cuma mendekati jarak antara orang tua dan sekolah masih itu dasar akses pendekatan, untuk ngurusi manajemen emang belum</p>	<p>Jadi aku pikir penerapan APBD Pro Rakyat yang tidak, dasar-dasar yang obyektif dan rasional itu justru akan kontra di lapangan. Banyak sepatu pro rakyat yang tidak dipakai. Banyak sepeda yang gak ada. Kalau aku pikir pprogram APBD yang dilaksanakan sekarang adalah program kejar tayang kayasinetron.</p>

<p>menginjak kesana. Cuma mbayari itu sepedah itupun ada masalah. Penerimaan yang tidaksesuai kebutuhan</p>	
<p>Ini tadi keadilan distributif dan keadilankumulatif</p>	<p>Iya seharusnya masyaraakt mendapatkan keadilan kumulatif disesuaikan dengan mereka. Kalau keadilan distributif harusnya keadilan dibidang hukum.</p>
<p>Pomo semacam itu hasil yang kita dapatkan ya memang bagus</p>	<p>Bagus dalam konteks berita di media untuk opini. Saya berusaha memandang se variabel ditarik enang merahnya, saya diminta omong sebagai apa, kalau sebagai itu, kalau orang tua ya seperti tadi. Ya mungkin narasi temuan yang akan njenen seperti apa pak?</p>
	<p>Sementara ini teori dalam arti ya paling ini tadi tapi nanti tak olah lagi, selama temuan yang b iasanya distributif tadi akhirnya ketemu yang kumulatif tadi, y kumulatif itu mungkin yang model, kita harapkan itu. Tapi setelah di sorot lebih t gak dengan model ini, paling gak Cuma saran, sebagai saran bahwa akan lebih b bilamana pelaksanaa itu dirasakan oleh semacaaam terhindar oleh kepentingan kepentingan politik maupun kepentingan financial.</p>

	<p>Kalau saya begini, kebijakan ini akan terasa istimewa piranti-piranti negara kita konsep negara kita ini kan memang menganut politika, tapi dilapangan ada pila Kalau semua piranti-piranti demokrasi berjalan sesuai atyuran yang ada terus m yang itu tadi luar biasa. Legislatiif, yudikatif, eksekutif, pilar ke 4 berjalan sesu koridor rilnya menggunakan model kumulatif itu akan luar biasa. Blitar ak kepeloporan pelaksanaan APBD Pro Rakyat, sayangnya tidak ditopang menggunakan keadilan distributif sehingga banyak yang salah sasaran, ini pilar de seharusnya legislatif mengawasi eksekutif secara serius karna ini yowesah ngk dengan halus. Yang paling khawatir adalah ada korupsi kebijakan, kan seperti penegak hukum ini tidak melakukan langah langkah hukum terhadap kebijakan t itu juga digunakan oleh lembaga vertikal, kalau dulu itu sekatrang govinda alirajr untuk mobil kepolisian inilah yang menjadi embrio suatu kebiajkan yang luar bi</p>
--	--

	<p>tidak ditopang piranti yang sehat, maksutnya kan .kan seharusnya DPR me penemuan seperti itu langsung koordinasi dengan BPK, ini enggak, APH naku kon ngomong dikondisikan akhirnya udah gak ada jera. Inilah sebuah keidealan terjadi.Cuma begini saya meyakini dengan terobosan omnibus law dilihat d dipangkas semua. APBD pro rakyat ini sebenarnya luar biasa apabila ditipang dengan piranti-piran legislatif, eksekutif dan media masa berfungsi sesuai rilnya, melakukanpendek pendekatan kumulatif dan eksekutif. Karna salah penempatan</p>
--	--

P	
<p>Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan. Kalau itu pertanyaan untuk sekolah cabang dinas, dalam arti kan setelah kalah di tetep di cap untuk masuk di provinsi kan banyak ijazah yang belum terbagikan karna tidak adaduit untuk diserap apakah itu sempat?</p>	<p>Efek domino dari sebuah kebijakan yang demokrasi susah,</p>
<p>Kan ada ijazah yang ditahan karna belum bisa bayarapakah Pro Rakyat bisa membantu itu?</p>	<p>Seharusnya bisa. Sebuah kebijakan harus muncul apabila ada efek domino</p>
<p>Termasuk sdm nya yang dulu dibiayai oleh Pemkotapakah</p>	<p>Untuk yang di sma ketika ada kebijakan bahwa SMA di backup oleh provinsi ini menggunakan APBD Provinsi</p>

<p>juga tetep dibiayai denganpemprov</p>	
--	--

<p>Karena itu dulu kan dari provinsi keadaerah banyak yang tidak diserap oleh kota atau kabupaten</p>	<p>Karna memang ada kebijakan kalau APBD kota untuk kota</p>
<p>Berarti beres ya itu . orang tua ya seneng ya tadi, Cuma bagi saya ya itu tadi ibaratnya melihat kebiasaanya, kurang cocok</p>	<p>Kalau syaa itu ya dipakai tapi gampang jebol, kualitasnya. Bahkan untuk sebun bgeitu besar mungkin untuk kontrolnya kurang. APBD pro rakyat itu jangan fasilitas untuk wifinya . wifi lebih bagus karna sekarang itu dengan konsep dagang oleh china.</p>

RIWAYAT HIDUP



Soebiantoro lahir di Blitar Jawa Timur tanggal 21 September 1949 anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan orang tua almarhum bapak Jitnosoparto (Pensiunan Kantor Bea dan Cukai Tulungagung) dan Ibu Moersini (Pensiunan Tenaga Kependidikan pada SMPN I Tulungagung). Saat ini tinggal bersama istri bernama Lilik Adiati Nursutji di Kota Surabaya Jawa Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak dengan 2 putri dan satu putra beserta 12 orang cucu. Anak pertama bernama Engelien Yusniar Permanasari, SE. MM, anak kedua bernama Amelia

Nuzulul Urfiani, SH dan anak ketiga bernama Oskhar Rosdiat Pramantoro, S.Sos. Pendidikan Dasar ditempuh di SDN Negeri 2 Tulungagung lulus pada tahun 1962, Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Tulungagung lulus pada tahun 1965, Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Blitar jurusan Pasti lulus tahun 1968. Pada tahun 1970 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tata Usaha (I/c) pada Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya mengikuti pendidikan tinggi pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang Tahun 1972 dan lulus pada tahun 1976.

Setelah lulus kembali menjadi staf pada Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1976 pada Bagian Pemerintahan Kota, dan pada akhir tahun 1976 diangkat sebagai Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Karangpilang merangkap sebagai Lurah Kebraon sampai dengan tahun 1978. Pada Tahun 1978 ditugas belajarkan pada Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta dan lulus Jurusan Politik pada akhir tahun 1981. Pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1989 diangkat menjadi Camat Rungkut dengan kesempatan mengikuti Diklat SUSPIMPEMDAGRI tahun 1989. Tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 diangkat sebagai Camat Gubeng dengan kesempatan mengikuti Diklat SEPALA Depdagri tahun 1991 dan Diklatpim III Sepadya di Jogjakarta tahun 1993.

Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 diangkat sebagai Asisten Sekretaris Daerah Kota Surabaya merangkap Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada tahun 1996 dimutasi menjadi Kepala Dinas Perumahan Kota Surabaya sampai dengan 1998 dengan kesempatan mengikuti Diklatpim II SPAMEN LAN pada tahun 1997 di Jakarta. Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 diangkat sebagai Pembantu Walikota Wilayah Kerja

Surabaya Timur. Pada tahun 1999 diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2004 dan pada kesempatan itu tepatnya pertengahan tahun 1999 dapat menyelesaikan Studi Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Tahun 2004 sampai dengan 2006 menjadi Sekretaris Daerah Kota Mojokerto dan sekaligus mendapatkan SK Pensiun dari PNS dengan pangkat Pembina Utama (IV/e).

Karir mengajar diawali pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta dibawah naungan Yayasan Bina Citra Anak Bangsa Blitar selaku Badan Penyelenggara yaitu Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan jabatan akademik Asisten Ahli (III/b). Pada tahun 2009 mendapat tambahan tugas sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 dipilih dan diangkat menjadi Rektor Universitas Islam Balitar (UNISBA)Blitar dalam masa jabatan selama 5 tahun. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan pasca sarjana S3 (Program Doktor) dan pada tahun 2021 mengikuti studi akhir menempuh pendidikan pasca sarjana S3 program studi Ilmu Administrasi dengan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya.